



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pati Ditinjau dari Asas Keadilan
FARIS ABYMANNU, Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN PATI DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

Faris Abymanyu* dan Taufiq Adiyanto**

INTISARI

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui potensi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada pengusaha yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan serta implikasinya terhadap legalitas usaha pertambangan dan mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pati ditinjau dari asas keadilan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dengan tambahan wawancara untuk memperkaya bahan analisa. Hasil penelitian dijelaskan dengan cara deskriptif dan dianalisis menggunakan metode kualitatif yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan serta wawancara.

Uang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan timbul secara otomatis ketika syarat objektif dan syarat subjektif pemungutan pajak terpenuhi. Pajak tersebut dikenakan kepada semua pengusaha mineral bukan logam dan batuan tanpa terkecuali, baik kepada pengusaha yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan maupun yang tidak. Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam kepada pengusaha yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak serta merta melegalkan kegiatan yang dilakukannya. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pati dinilai masih belum memenuhi asas keadilan pemungutan pajak secara menyeluruh. Aspek asas keadilan yang terpenuhi adalah keadilan vertikal. Sementara itu, aspek keadilan yang belum terpenuhi adalah keadilan horizontal.

Kata Kunci: Pajak, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Asas Keadilan, Legalitas

* Mahasiswa Departemen Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen Departemen Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pati Ditinjau dari Asas Keadilan
FARIS ABYMANNU, Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

THE ANALYSIS OF NON METALIC MINERALS AND ROCKS TAX COLLECTION IN PATI REGENCY REVIEWED FROM THE BASIS OF LEGAL EQUITY

Faris Abymanyu* and Taufiq Adiyanto**

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to determine the non-metallic minerals and rocks tax collection potency to the unauthorized miners, its implication with the legality of their mining activities, and find out the non-metallic minerals and rocks tax collection in Pati Regency viewed with principle of tax equity. This research was done by normative legal study methods with interview to enlarge the analysis. The results of this research were explained by descriptive methods and analyzed by qualitative data based on library research and interview results.

The non-metallic minerals and rocks tax debt will automatically arise when the objective and subjective tax collection is fulfilled. This tax is charged to all miners without exception, either to the legal miners or illegal miners. The non-metallic minerals and rocks taxation to illegal miners did not make their mining activities became legal automatically. The non-metallic minerals and rocks tax collection in Pati Regency still has not fulfilled the principle of tax equity entirely. The elements of the principle of tax equity are only fulfilled on vertical equity aspect. Meanwhile, the aspect of horizontal equity has not been fulfilled yet.

Keywords: tax, non-metallic minerals and rocks, the principle of tax equity, mining business legality

* Student of Tax Law Departement, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Lecturer of Tax Law Departement, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.